

BAB 7

KESIMPULAN

Setelah melihat fenomena dalam konflik partai politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif tahun 2004, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik.

Jika dilihat lebih jauh, ada tiga dimensi yang menyebabkan meletusnya konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu. Ketiganya itu dimensi politik, sosial ekonomi dan budaya.

Pada dimensi politik, terdapat tiga faktor sebagai penyebab yaitu pertama adanya persepsi ancaman eksternal PDI Perjuangan dari partai-partai lain, kedua adanya kemiripan ideologi partai (perebutan simbol) serta kegagalan negara dan elit dalam mengontrol massa. Sebagai partai yang berusaha meraih kembali dukungannya, Partai Golkar mencoba melakukan berbagai langkah populis. PNI Marhaenisme dan PNBK juga berupaya melakukan konsolidasi karena mereka merupakan partai baru. Kegiatan partai inilah yang dipersepsikan PDI Perjuangan sebagai ancaman eksternal. Kemiripan ideologi antara PDI Perjuangan, PNBK, dan PNI Marhaenisme juga mengkhawatirkan PDI Perjuangan. Ketiga partai itu memakai nama Soekarno atau keluarga besarnya untuk menggali basis dukungan massa. Ketiga, ikut dipakainya simbol negara dalam aktivitas partai serta tidak maksimalnya penanganan terhadap para pelaku kerusuhan membuat konflik-konflik tersebut cenderung terulang. Dalam hal ini elit PDI Perjuangan mengakui gagal mengantisipasi beragam corak dari simpatisannya.

Dari dimensi Sosial-ekonomi, konflik itu disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terutama yang berposisi marginal atas janji-janji pemerintah di masa lalu (*deprivasi relatif*). Ini lebih banyak mengacu kepada konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Partai Golkar masih diidentikkan dengan Orde Baru. Sedangkan massa PDI Perjuangan yang kecewa banyak yang berasal dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelas menengah ke bawah. Dalam dimensi ini konflik juga disebabkan karena adanya upaya memperebutkan posisi-posisi sosial dan ekonomi. Posisi sosial itu bisa berupa jabatan struktural partai atau negara (anggota dewan), yang memberikan jaminan penghasilan ekonomi lebih mapan. Upaya mencapai posisi ini dilakukan dengan pengerahan anak-buah agar terlihat membela eksistensi partai. Pengerahan inilah yang memancing konflik antara satu partai dengan partai lainnya.

Dari dimensi kebudayaan, faktor yang menyebabkan konflik adalah dijumpainya budaya kekerasan yang ikut ke dalam pengerahan massa. Budaya kekerasan itu muncul dari para penjudi sabungan ayam yang terlibat dalam konflik ini. Di lapangan cukup banyak simpatisan PDI Perjuangan yang berkecimpung pada sabungan ayam, ikut terlibat konflik. Demikian pula dengan partai lainnya. Disamping itu dijumpai juga aktivitas berupa minum minuman keras sebelum melakukan kegiatan partai. Penafsiran yang keliru terhadap simbol-simbol budaya lokal seperti *segalak*, *seguluk*, *segilik*, *salunglung sebayantaka* yang artinya senasib seperjuangan, *suryak siu* (setuju bersama tanpa memikirkan lebih cermat) serta konsep "pantare" yang artinya berjuang di segala lapisan dari PDI Perjuangan, ikut memegang peran sebagai penyebab konflik.

Dengan demikian persepsi ancaman eksternal, kemiripan ideologi, kegagalan negara serta partai dalam mengontrol massa, *deprivasi relatif*, upaya meraih posisi-posisi strategis, budaya kekerasan dan penafsiran yang keliru terhadap budaya lokal merupakan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme, serta PNBK menjelang dilangsungkannya pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Tabanan, Bali.

Tetapi konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan tidak berlangsung hingga masa pemilihan umum. Artinya hari pencoblosan berlangsung dengan aman tanpa gangguan. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mekanisme resolusi banyak jalur (*multitrack*) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun pemerintah. Unsur-unsur yang terlibat itu adalah lembaga lokal seperti adat dan dinas, elit lokal seperti bupati, Kapolres, Ketua KPU maupun Panwaslu. Termasuk juga lembaga swadaya masyarakat, elit partai dan simpatisan partai politik.

Upaya yang dilakukan segenap komponen itu dalam menekan konflik adalah dengan berupaya menciptakan konsensus maupun kompromis antar partai politik dengan teknik-teknik mediasi, konsiliasi termasuk juga diplomasi dan negosiasi informal yang bisa meredakan suasana panas. Pendidikan politik juga merupakan salah satu teknik yang dipakai meredakan konflik. Sedangkan pihak kepolisian bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga ketertiban.

Di daerah-daerah yang dilanda konflik, lembaga adat merespon konflik dengan upaya mediasi serta kesepakatan bersama, yang disebut dengan *perarem*. Kesepakatan ini berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penduduk

setempat maupun penduduk luar yang berada di wilayah yang bersangkutan. *Perarem* juga memuat sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan yang ada. Dengan ketentuan yang ketat demikian, baik warga setempat yang menjadi simpatisan partai tertentu maupun warga luar yang datang, tidak berani melakukan pelanggaran. Situasi kondusif terhadap keamanan dan ketertiban cepat pulih dengan adanya ketentuan seperti ini.

Secara individual, tokoh-tokoh adat di daerah setempat juga memegang peranan penting untuk mencegah kembali terulangnya konflik. Di Banjar Bongon Lebah misalnya kepala adat datang langsung saat terjadinya konflik dan memberikan pengarahan, baik kepada warga setempat maupun warga luar yang terlibat. Pendekatan bahasa daerah dengan memakai lambang adat (seperti pakaian adat) pada saat memberikan imbauan, berhasil meredakan konflik yang terjadi. Sedangkan di tempat-tempat lain, masyarakat efektif melakukan penjagaan menjelang pemilu yang mengatasnamakan adat untuk melakukan ronda. Inisiatif untuk melarang kampanye juga memberikan sumbangan berarti mencegah terulangnya konflik. Ini terjadi di Desa Tunjuk, yang berasal dari Kepala Desa, yang disetujui oleh kepala adat.

Konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan bisa dicegah melalui konsensus dan kompromis antara partai politik dengan mediator elit lokal. Setelah berlangsung berbagai konflik di kabupaten ini, tanggal 13 Agustus 2003 digelar pertemuan lintas partai di kantor Bupati Tabanan. Disini disepakati beberapa ketentuan yang mencerminkan adanya pengurangan tuntutan dari masing-masing partai politik untuk menciptakan suasana aman di kota Tabanan. Upaya ini kemudian disebarluaskan oleh bupati Tabanan di setiap daerah bawahannya guna

menekan konflik antar partai politik. Upaya konsensus juga dicapai pada masa kampanye pemilu, seperti yang terjadi di Desa Sanda yang tidak saja melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh partai politik tetapi juga pihak kepolisian. Disini kesepakatan berupa pemasangan kembali bendera yang dicabut serta upaya penjagaan bendera partai merupakan sintesa berbagai pendapat yang terjadi pada saat pertemuan.

Upaya lembaga-lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum, serta Panwaslu berpengaruh terhadap situasi keamanan di Tabanan. Komisi Pemilihan Umum menerapkan strategi berupa strategi pada tingkat elit dan akar rumput, dengan memfasilitasi pertemuan antar pemimpin partai politik (pada tingkat elit) dan melakukan ceramah-ceramah ke ratusan desa yang ada di Kabupaten Tabanan (pada tingkat akar rumput). Upaya ini dilakukan jauh hari menjelang hari kampanye. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan melakukan strategi mirip dengan apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, yaitu dengan memfasilitasi ceramah ke desa-desa. Lembaga Swadaya Masyarakat juga memfasilitasi mendatangkan tokoh-tokoh spiritual. Sedangkan Panwaslu menerapkan strategi berupaya menangani laporan persengketaan pemilu dengan cepat dan adil.

Jadi, konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan itu bisa diselesaikan melalui upaya rekonsiliasi *multitrack* yang melibatkan segenap komponen masyarakat untuk mencapai konsensus dan kompromis melalui teknik rekonsiliasi, mediasi, serta pendidikan politik. Sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa akan terjadi kerusuhan besar pada saat hari pencoblosan, tidak terbukti.

Hal yang Direkomendasikan

Satu hal yang mesti harus dipertimbangkan ke depan adalah bahwa karena sifat politik di Indonesia itu masih musiman, yakni muncul lima tahun sekali menjelang dan pada saat pemilihan umum, perlu langkah-langkah untuk mencegah konflik antar partai ini muncul kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt bahwa kompromis itu akan dihargai sepanjang kekuatan keseimbangan tersebut tidak berubah. Jika kemudian keseimbangan itu berubah, kemungkinan kesepakatan-kesepakatan dalam kompromis itu dikhianati yang bisa memicu munculnya konflik.

Dalam kasus konflik politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum legislatif 2004 yang lalu, kompromis itu terjadi karena adanya kekuatan perantara yang mendukung, seperti adanya mediasi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh politik yang membuat kelompok politik yang lebih besar bersedia mengurangi tuntutan mereka dan menyepakati kompromis. Munculnya perantara ini bisa dipandang sebagai unsur penguat yang membantu kekuatan politik yang lebih lemah sehingga mempunyai kekuatan seimbang dalam mencapai kompromis itu.

Karena itu, tokoh-tokoh perantara yang ikut membantu tercapainya kompromis ini tidak boleh lengah dalam perjalanan waktu ke masa depan. Artinya konsistensi dan sikap mereka harus tetap konsekuen untuk menjaga ketertiban politik di kabupaten Tabanan.

Demikian pula, pihak lembaga adat beserta tokoh-tokohnya harus mempunyai sikap yang konsisten, konsekuen dan ajeg dalam menjaga keamanan lingkungannya. Dalam konflik partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan, lembaga ini amat berperan.

Karena kesepakatan dan sanksi yang dihasilkannya ampuh untuk meredakan pengulangan konflik di daerah yang sebelumnya terlanda konflik. Karena itu hal yang penting yang harus dilakukan pihak lembaga adat adalah dengan membuat *awig-awig* dan *perarem* yang bersifat tetap dan disahkan oleh paruman banjar atau lesa adat dan diberlakukan ke dalam lingkungannya. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Tabanan harus secepatnya menyelenggarakan sosialisasi atau membuat perda yang mengharuskan setiap desa adat membuat *awig-awig* dan *perarem* yang memuat tentang pencegahan keributan, mengikat secara internal maupun eksternal. Meski demikian aturan-aturan ini mesti tetap mendapat pembaruan, disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, banyak disebabkan oleh situasi insidental seperti arak-arakan simpatisan partai, perasaan balas dendam serta perasaan iri-rancam oleh eksistensi partai lain yang dipandang sebagai kompetitor. Kemunculan konflik seperti ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna dan arti berpolitik bagi para simpatisan partai politik. Karena itu di masa depan, setiap partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik kepada para simpatisannya agar memahami makna politik dan kompetisi. Forum lintas partai juga perlu didirikan di Kabupaten Tabanan dengan kegiatan periodik tertentu, agar mampu menggelar diskusi-diskusi serta mempertemukan para kader antar partai politik. Cara seperti ini akan mampu mempertemukan antar kader partai politik dan saling menambah wawasan tentang kegiatan politik. Tidak keliru jika bupati Tabanan sebagai pembina politik daerah tingkat II, memelopori pembentukan forum seperti ini atau akan lebih baik jika mensponsori pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang bisa

memberikan pendidikan politik kepada para kader partai politik. Ini demi memberikan suasana yang mendukung ke arah rekonsiliasi politik di kabupaten Tabanan.

Dalam perjalanan ke depan, lembaga formal yang tugasnya memang menjaga keamanan, harus sigap menghadapi konflik-konflik politik yang mungkin terjadi. Kesigapannya sangat membantu penyelesaian konflik politik. Sedangkan lembaga yang memang terkait dengan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus mampu membaca situasi lapangan, setidaknya seperti yang telah dilakukan oleh dua lembaga ini menjelang pemilu legislatif 2004, demi meminimalisir konflik yang terjadi

Penelitian di Depan

Ke depan, penelitian menarik yang kiranya perlu dilakukan adalah tentang kaitan antara kemerosotan pertanian dengan munculnya konflik antar partai ini. Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan ini, konflik dengan frekuensi yang cukup intens, terjadi di basis-basis pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tabanan, seperti di Penebel, Marga, Pupuan dan Selemadeg. Secara umum Tabanan merupakan wilayah produk pertanian dan perkebunan paling unggul di Bali. Tetapi konflik politiknya juga tinggi. Karena itu perlu diteliti apakah konflik di Tabanan yang cukup tinggi itu disebabkan oleh adanya penurunan produksi di sektor pertanian atau ada faktor lain yang mempengaruhi.

Kedua, dari konflik-konflik antar partai yang terjadi itu, terlihat cukup banyak tokoh-tokoh partai (terutama dari PDI Perjuangan) yang ikut terlibat bersama massa

dalamnya. Perlu kajian yang bersifat psikologis tentang bagaimana latar belakang
dan situasi kejiwaan elit partai politik tersebut agar bisa menjelaskan fenomena
konflik di Kabupaten Tabanan yang lebih lengkap. Tujuannya tentu di masa depan
agar pencegahan terhadap konflik antar partai di daerah ini lebih mudah
diatasi.*****